



SDM Penyidik Perpajakan Harus Berkualitas

YOGYA (MERAPI) - Peningkatan pengawasan pembayaran pajak dengan rencana pembentukan tim Penyidik PNS (PPNS) khusus perpajakan di Pemkot Yogyakarta didukung dewan. Namun sumber daya manusia (SDM) yang mengisi jabatan itu harus memiliki aturan tugas yang jelas, berkapasitas dan berkualitas.

"Tim PPNS harus memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas agar tidak terjadi manipulasi yang justru merugikan keuangan negara," kata Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Nasrul Khoiri, Senin (13/4).

Dia menyebut pemkot tidak perlu terburu-buru karena dinas terkait di pemkot perlu meningkatkan kapasitas personel untuk penanganan bagi pelanggar pajak. SDM yang ditempatkan dalam tim PPNS harus memiliki kapasitas dan berkualitas agar ketugasannya dapat maksimal.

Menurutnya pemkot juga perlu meningkatkan sistem pembayaran pajak yang mampu mengurangi potensi penyelewangan pajak. Sistem yang sudah dilakukan pemkot dalam pembayaran pajak hotel dan restoran secara on line atau e-tax perlu dikembangkan lebih luas.

"E-tax cukup bagus karena sistem yang bekerja untuk mengurangi potensi kebocor-

an penerimaan pajak restoran dan hotel. Sekarang masih ujicoba, kalau sudah siap segera diterapkan ke seluruh wajib pajak," tuturnya.

Kini baru ada 14 wajib pajak hotel dan restoran di Kota Yogyakarta yang melaksanakan pembayaran pajak dengan e-tax. Jumlah wajib pajak hotel dan restoran di Kota Yogyakarta mencapai ratusan.

Secara terpisah Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan rencana pembentukan tim PPNS pajak itu sejalan dengan pemerintah pusat yang melakukan tindakan tegas dengan pidana hukum bagi wajib pajak yang melanggar. Pembentukan PPNS perpajakan itu juga untuk memastikan kepesertaan dan kepatuhan dalam membayar pajak daerah.

"Pajak itu kan kewajiban yang harus dibayarkan. Bukan sumbangan. Kalau tidak membayar sesuai ketentuan atau tidak taat ada sanksinya," ujarnya.

Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta kini tengah menggodok penyusunan tim penyidik khusus bidang perpajakan. PPNS itu akan dibekali kemampuan terkait pajak daerah. Fokus pengawasan pembayaran pajak daerah pada tahap awal untuk pajak hotel dan restoran. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005